

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengembangan menurut Hasibuan (2011:69) di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa pengembangan yaitu sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan pengembangan menurut Saydam (2011) menyatakan bahwasannya dalam pengembangan SDM, ialah suatu kegiatan dalam organisasi, dengan melihat pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) yang menuntut untuk memperkerjakan mereka yang dilakukan. Dalam peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu rencana dalam peningkatan personalia dengan target dicapai suatu rancangan pekerjaan dalam jenjang organisasi (Wardana, 2012).

Ia membebaskan individu tidak hanya dari ikatan dan ketergantungan yang ada antara individu dan negara-bangsa, tetapi juga dari kekuatan kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pelaksanaan Pembangunan merupakan cara yang sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan negara yang lebih maju, dengan berbagai aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan akan terwujud. Oleh karena itu, setiap negara memiliki

perkembangan nasional yang berbeda-beda. Strategi pembangunan yang dilaksanakan perlu menjamin kesetaraan dan keadilan serta menjaga keragaman masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah pembangunan manusia yang utuh dan utuh, pembangunan manusia dalam kehidupan masyarakat. Seperti negara-negara lain, Indonesia sedang merencanakan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia tertuang pada Pancasila ke-5, “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, & tujuan berdasarkan peraturan tadi merupakan buat menciptakan warga yang adil & makmur. Selain itu, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maknanya menjelaskan fungsi dan merupakan tujuan negara Indonesia. Dalam artian UKM merupakan ekonomi yang mandiri dan produktif, yaitu tidak berfungsi sendiri-

sendiri atau berkelompok dalam forum usaha bercabang. Kinerja usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha tunggal dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 dan penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. UKM adalah perusahaan yang mandiri, produktif dan pada pengelolaannya oleh perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan atau cabang. Kriteria, yaitu aset maksimal Rp. 500.000.000, dan penjualan tahunan Rp. Ada 2.500.000.000. Perusahaan menengah adalah perusahaan produktif yang berdiri sendiri dan dikendalikan oleh individu atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang. Ada standar. Dengan kata lain, aset tersebut adalah Rp, kecuali tanah dan bangunan tempat perusahaan berada. Penjualan tahunan adalah Rp, tidak melebihi 10.000.000.000. Tidak melebihi 50,000,000,000 (Natasya & Hardiningsih, 2021). 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi kecil yang perlu dilindungi dan dilindungi dari persaingan tidak sehat. Selama satu dekade terakhir, perusahaan UMKM mulai memulai bisnis perumahan dan berkembang menjadi bisnis yang lebih besar.

Banyak perusahaan besar di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan dan jasa, mengalami stagnasi pada tahun 1998 bahkan tutup. Namun, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan dan pulih dari resesi akibat krisis mata uang di berbagai sektor ekonomi. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha di mana perekonomian nasional dapat dikembangkan dan dipertahankan secara konsisten. UMKM merupakan wadah yang sangat baik untuk menciptakan karya yang produktif. UMKM merupakan perusahaan mempekerjakan karya yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti peningkatan pendidikan, skill keterampilan pekerja, menggunakan modal perusahaan yang relatif sedikit, dan cenderung menggunakan teknik yang sederhana.

UMKM ini memiliki suatu jenis komoditi/barang yang terdapat dalam usahanya nir tetap, atau mampu berganti sewaktu-saat menggunakan lokal pada menjalankan usahanya mampu berpindah-pindah. Dalam usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan langsung & keuangan bisnis masih disatukan menggunakan asal daya manusia (SDM) yang didalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni & umumnya pada strata pendidikan SDM nya masih sangat rendah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian. DISKOPERINDAG ini yang saya ambil adalah fungsi dalam program kerja untuk pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Pematang.

Pada Pembangunan ekonomi penting bagi bangsa karena dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Adanya pembangunan ekonomi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan seiring dengan perkembangannya, mendatangkan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut (Todaro dan Smith, 2012), pembangunan ekonomi adalah studi tentang bagaimana perekonomian berkembang dari negara yang stagnan ke negara berpenghasilan rendah dalam rangka untuk mengatasi masalah kemiskinan. Cakupan pembangunan ekonomi begitu luas sehingga selain distribusi barang yang efisien, ada sumber daya publik dan swasta, mekanisme ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan.

Todaro dan Smith (2012) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, masyarakat harus mengejar tiga tujuan pembangunan. Meningkatkan standar hidup seperti pendapatan yang lebih tinggi, lebih banyak kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan minat yang lebih besar pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Pemalang mengalami kesulitan ekonomi pada pelaku UMKM karena pada terdampaknya pandemi covid-19. Yang semua merasakan dampak atas pandemi covid-19 yang dimana perekonomian sangat turun drastis omsetnya karna penurunan konsumen. Dalam penanganan seperti itu harus perlahan guna memperbaiki perekonomian apalagi dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada berbagai daerah seluruh Indonesia. Tahun 2019 semua kegiatan berbagai sektor dan ruang publik di Indonesia berjalan dengan normal dan semestinya. Namun, awal tahun 2020 perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia telah dimulai. Dimana tahun 2020 pandemi Covid – 19 menyerang Indonesia. Pengaruh Covid – 19 memaksa pemerintah untuk merubah strategi dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Kebijakan PSBB sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian masyarakat karena terjadi penurunan pendapatan, mengingat berbagai ruang publik seperti mall, tempat wisata, kantor, tempat ibadah, sekolah, rumah makan, transportasi umum dan juga tidak terkecuali bagi UMKM.

Sebagian besar wilayah Indonesia merasakan dampak Covid – 19 begitu pula dengan wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya khususnya daerah Pemalang merupakan sebuah kota yang nota bene sangat berpenopang pada usaha dan dengan memiliki banyak aset budaya dan pariwisata sehingga dapat mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. UMKM menjadi sektor penting mensokong perekonomian di Kota Pemalang karena dapat dengan mudah untuk dijumpai.

Meningkatnya jumlah UMKM memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Namun, adanya Pandemi Covid – 19 membuat sebagian UMKM menutup usahanya karena sepi pembeli dan kerugian yang dialami. Mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat strategi dan kebijakan baru.

Pengaruh tahun 2019 sebelum pandemi Covid - 19 dan tahun 2020 pasca pandemi Covid – 19 juga dirasakan UMKM pada setiap wilayah kabupaten/Kota di Pemalang. Salah satunya adalah dengan data UMKM di Kabupaten Pemalang 16.877. Sangatlah berdampak besar untuk memulihkan pelaku usaha dalam pengembangan UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul "Strategi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2019 - 2022."

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dengan maksud untuk mempermudah ulasan serta bahasan dari materi ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah kabupaten Pemalang dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2019-2022?*
- 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah Pemalang dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2019-2022?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial pada penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengembangan UMKM
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah Pemalang dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Dapat meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan usaha kecil UMKM.
- b. Dapat meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- c. Dapat menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- d. Dapat menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk mempelajari kebijakan pemerintah.
- e. Dapat mengembangkan usahanya dalam meningkatkan daya saing pasar di media sosial.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki beberapa referensi dan referensi tentang strategi pemerintah dalam pengembangan UKM. Dari berbagai sumber tersebut, terdapat berbagai jenis penilaian terhadap strategi pemerintah dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil. Strategi pemerintah tentu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ekonomi. Sebagai.

Tabel 1
Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Kusnadi et al., 2020)	Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang	The World of Business Administration Journal, 2020, 2 (2) 103-120	Tujuan dilakukannya penelitian penulis ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Subang Koperasi, UMKM dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Penelitian dan penulisan ini menggunakan teori Mellie S. Grindle, isi kebijakan kepentingan sasaran, untuk membahas isu-isu terkait implementasi kebijakan dalam pengembangan UMKM di koperasi, UMKM, perdagangan dan jasa industri. . Kelompok, sifat hasil, tingkat perubahan yang diinginkan dan

				<p>lokasi pengambilan keputusan, implementasi program, sumber daya terkait. Lingkungan implementasi terdiri dari kekuasaan, kepentingan, strategi, karakteristik organisasi, dan kontrol dari para aktor yang terlibat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan observasi, wawancara, survei kepustakaan dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan sumber data yang diperoleh dari sumber melalui observasi dan wawancara langsung, serta dokumen berupa wawancara dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Koperasi, UMKM dan Dinas Perindustrian Kabupaten Subang efektif dalam hal jenis manfaat, tingkat perubahan yang diinginkan, di mana keputusan dan program dilaksanakan, dan sumber daya terkait.</p> <p>. Karakteristik kelembagaan dan pengelolaan kekuasaan, kepatuhan,</p>
--	--	--	--	--

				dan penyitaan tidak efektif untuk kepentingan kelompok sasaran, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat.
2.	(Herlyansah, 2016)	Implentasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang	Ilmu Administrasi Negera 2016, 235	Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Tangerang. Permasalahan yang diidentifikasi peneliti dalam penelitian ini adalah kurangnya lembaga keuangan mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam menangani permodalan, dan belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Tangerang. Sosialisasi Industri yang dilaksanakan Dinas Koperasi Perdagangan Tangerang tidak berjalan efektif karena masih banyak pejabat UMKM yang belum memiliki sertifikat Halal dan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Koperasi Industri Kota

				<p>Tangerang belum memadai. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk implementasinya. Yaitu, ruang lingkup dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, karakteristik lembaga penegak, sikap/bias lembaga penegak, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Survei ini menggunakan metode survei kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UKM (UMKM) di Tangerang sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam banyak hal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koperasi dan database UMKM di kota Tangerang.</p>
3.	(Erdawati, 2021)	Pandemi Covid-19 Dampaknya Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Pasaman Barat	Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT), 2 nomor 1 (1), 13-37.	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi UMKM di Barat Kabupaten Pasaman sebelum pandemi COVID-19, selama pandemi COVID-19 dan selama periode New Normal.</p>

				<p>Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik ukuran sampel yang didasarkan pada</p> <p>UMKM di Pasaman Barat masih di atas normal, sedangkan pada saat pandemi COVID-19 kondisi operasional UMKM mengalami penurunan penjualan usaha sebesar 75%. Dan selama era New Normal, kondisi UMKM masih di bawah normal, karena daya beli masyarakat masih turun 50%.</p> <p>Kunci.</p>
4.	(TP2NK & FEB UI, 2021)	Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	T. TP2NK, L. FEB UI, 71-73.	<p>Koperasi dan Dinas UKM berperan penting dalam mengkoordinasikan kebijakan dan program serta pendataan program UMKM dan penerima manfaat/peserta program. Namun untuk koordinasi yang baik, koperasi dan Kementerian UKM perlu pendampingan berupa regulasi dan perubahan kelembagaan. Salah</p>

				<p>satunya adalah menaikkan level organisasi sebagai deputy koordinator Program Pemberdayaan UMKM, memungkinkan kementerian/lembaga untuk melaporkan program dan data kepada koperasi dan Kementerian UKM. Selain itu, sumber daya manusia dan organisasi perlu diperkuat untuk memungkinkan Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan sistem basis data, harmonisasi peraturan dan pedoman, serta program “kebijakan satu pintu”. Pengalaman dengan Malaysia, India dan Taiwan menunjukkan bahwa upaya untuk mengembangkan UMKM domestik tingkat tinggi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memulai sinkronisasi program baik oleh lembaga maupun kementerian.</p>
5.	(Literate & Indonesia, 2020)	Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Perindustrian Dan	Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (<i>Cucurbita Moschata</i>)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan, peralatan dan harga secara

		Perdagangan Kabupaten Pematang Terhadap Pedagang Umkm Yang Tidak Mencantumkan Label Kesehatan Pada Produk Makanan	Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering, 274-282.	parsial dan simultan mempengaruhi kepuasan konsumen. Survei dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif karena data survei dalam format numerik dan analisisnya menggunakan statistik. Subjek survei ini adalah Hotel Emilia, dan subjek survei ini adalah konsumen yang menginap di Hotel Emilia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling bertarget, dimana peneliti menentukan jumlah kuota sampel untuk 190 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, peralatan dan harga bersifat parsial dan sekaligus berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.
6.	(Lili Marlinah, 2020)	Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat	Jurnal Ekonomi, 22 (2), 118-124	Peluang dan Tantangan Usaha UMKM/UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) saat ini terletak pada mendorong dan berusaha

		Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19		memberdayakan usaha mikro kecil agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, tangguh dan mandiri. Kekuatan, ketangguhan dan kemandirian usaha UMKM saat ini berarti menjadi modal kuat pencatatan nasional dalam perjuangan persaingan pasar bebas dan pandemi Covid 19. dan juga dukungan penuh dari pemerintah dapat digunakan untuk mengatasi tantangan era digitalisasi dan era milenial. Keberhasilan dan keberlanjutan UMKM meningkatkan kecepatan pembangunan ekonomi dengan menghadirkan wirausahawan muda yang memperkenalkan inovasi berbagai jenis produk dan layanan baru serta memanfaatkan teknologi secara efisien.
7.	(Setiawan & Fadillah, 2020)	Pendampingan Penerapan Strategi Promosi Berbasis Digital Bagi UMKM	Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan, 1 (1), 29-36.	Menjalankan bisnis membutuhkan banyak kreativitas dan kemampuan beradaptasi untuk berubah. Kreativitas bisnis dengan memanfaatkan

		Di Wilayah Kota Bogor		perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pandang para pelaku bisnis yang menjalankan bisnis. Tidak hanya pengusaha besar, tetapi juga sektor UMKM untuk pemasaran korporat bisa mendapatkan keuntungan dari ini. UMKM di Kota Bogor harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan kreativitas usaha. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM dalam menggunakan internet untuk operasional bisnis. Hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di Bogor mengenai keberadaan dan perkembangan teknologi informasi untuk optimalisasi bisnis guna meningkatkan kinerja Kota Bogor, dan tercapainya optimalisasi pengetahuan identifikasi riset pasar berbasis digital. UMKM.
8.	(Santoso, 2020)	<i>Review Of Digital</i>	Jurnal Ilmu Ekonomi	Kajian ini mengkaji strategi UMKM

		<p><i>Marketing & Business Sustainability Of E-Commerce During Pandemic Covid 19 In Indonesia</i></p>	<p>Terapan, 5 (2), 36-48.</p>	<p>untuk bertahan dan tumbuh kembali di masa pandemi Covid-19. Survei tersebut melibatkan 37.000 pelaku UMKM yang mengalami dampak langsung dari pandemi. Studi sastra digunakan sebagai metode. Menurut survei ini, konsumen hampir melupakan merek mereka selama pandemi, sehingga komunikasi melalui iklan digital mendapatkan kembali kesadaran merek. Perilaku digital mendorong pertumbuhan konsumen online, bukan milenium. Beberapa UMKM bangkrut. Namun, sejumlah besar orang akhirnya bangkit dan berevolusi. UMKM melakukan transformasi proses produksi dengan mengurangi produksi sekaligus berinovasi agar lebih kompetitif. Di sisi lain, penggunaan digital marketing dalam skala besar sedang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan. Pasar sebagai salah satu bentuk e-commerce digunakan sebagai inovasi atau perubahan cara kita</p>
--	--	---	-------------------------------	--

				menjual.
9.	(Aminy & Fithriasari, 2021)	Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM Di Jawa Timur	Seminar Nasional Official Statistics, 2020 (1), 15-22.	Langkah pemerintah: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Telecommuting (WFH), dan Telecommuting (SFH) telah mengubah mobilitas masyarakat, termasuk penurunan indikator mobilitas masyarakat sawah. Oleh karena itu, Anda dapat dengan mudah mengakses rekomendasi, dukungan pemasaran online UMKM, dan keuangan.
10.	(Natasya & Hardiningsih, 2021)	Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan Umkm Di Masa Pandemi	Ekonomis : <i>Journal of Economics and Business</i> . 5 (1), 141.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM selama pandemi Covid 19. Survei dilakukan pada UMKM di Semarang Barat dan Semarang Tengah. Subyek survei ini adalah pelaku UMKM yang telah mengklaim insentif pajak dan menerima bansos di Semarang Barat dan Semarang Tengah. Metode

				<p>analisis menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan peningkatan modal kerja akan berdampak pada perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada pengujian dengan pendekatan teori daya tarik industri. Hasil kajian ini memberikan informasi tambahan untuk mempersiapkan program besar program perlindungan dan pemulihan keuangan bagi UMKM yang terkena dampak Covid19 dan untuk mengevaluasi strategi bisnis UMKM model bisnis UMKM terbaru sesuai dengan protokol kesehatan dapat diberikan kepada pemerintah.</p>
--	--	--	--	--

1.6 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka pada dasar teori dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap aspek-aspek dalam mencari kerangka teori. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

1.6.1 Teori-Teori Strategi

Strategi merupakan pola mendasar berdasarkan tujuan kini dan yang direncanakan, penerahan asal daya, & hubungan berdasarkan organisasi menggunakan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan yg lain. Strategi dari berdasarkan bahasa Yunani *strategos*, yang berarti jenderal, sang karenanya secara harfiah “seni para jenderal”, istilah ini mengacu dalam apa yg adalah perhatian primer zenit organisasi, sedangkan secara spesifik taktik merupakan inovasi misii perusahaan, penetapan target organisasi menggunakan mengingat kekuatan eksternal & internal buat mencapai tujuan organisasi.

Menurut Alfred Chandler sebagaimana dikutip sang James C. Craig & Robert M. Grant, taktik adalah3 penetapan target & tujuan jangka panjang sebuah perusahaan & arah tindakan dan alokasi asal daya yg dibutuhkan buat mencapai target & tujuan tertentu.

Menurut chandler taktik adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan pada kaitannya menggunakan tujuan jangka panjang, acara tindak lanjut, dan prioritas alokasi asal daya. Sedangkan dari porter, taktik merupakan indera yg sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Menurut Hamel & Prahalad (1995) taktik merupakan tindakan yg mempunyai sifat incremental (senantiasa meningkat) & terus – menerus & dilakukan menurut sudut pandang mengenai apa yg dibutuhkan sang para

pelanggan dalam masa yg akan datang. Dengan begitu pada merencanakan taktik kebanyakan dimulai menggunakan "apa yang bisa terjadi", bukan dimulai dari "apa yg terjadi". Terjadinya kecepatan penemuan pasar baru & perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Dimana perusahaan wajib mencari kompeten inti pada pada usaha yg dilakukan.

Jadi bisa disimpulkan taktik adalah cara buat mencapai tujuan yg sudah direncanakan, menggunakan menyebutkan apa yg wajib dicapai, kemana akan berfokus, & bagaimana asal daya & aktivitas mana yg akan dialokasikan buat setiap produk pasar pada memenuhi peluang & tantangan lingkungan dan buat meraih keunggulan kompetitif.

A. Tipe – Tipe Strategi

Menurut Salusu (1996: 105), jenis-jenis strategi adalah:

1. Strategi Corporate (strategi organisasi)

Corporate Strategy adalah strategi yang berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, nilai, dan inisiatif strategis baru. Dalam hal ini, batas diperlukan. Apa yang dilakukan untuk siapa.

2. Strategi Program (strategi program)

Program strategis ini lebih memperhatikan implikasi strategis dari program tertentu. Misalnya, apa implikasi dari memulai atau menerapkan program dan apa implikasinya terhadap tujuan bisnis Anda?

3. Dukungan Sumber Daya

berfokus pada memaksimalkan ketersediaan sumber daya penting yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi Anda. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4. Institusional Strategy (Strategi kelembagaan)

Fokus dari institusional strategy adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif – inisiatif strategi.

B. Tahap Strategi

Menurut Bambang Hariadi (2005), langkah-langkah untuk menentukan strategi adalah sebagai berikut:

a. Perumusan

- 1) Tahap pertama ini meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, yaitu penetapan visi, misi, rencana, dan sasaran strategis.
- 2) Pengembangan strategis adalah proses penyiapan langkah-langkah ke depan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi yang merupakan tujuan strategis untuk memberikan nilai pelanggan tertinggi.
- 3) Identifikasi lingkungan yang ingin Anda masuki dan tentukan misi Anda untuk mencapai visi yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.
- 4) Menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi.
- 5) Tetapkan tujuan dan sasaran.
- 6) Pemimpin memulai dengan menetapkan visi tentang apa yang mereka inginkan di masa depan dan misi apa yang sekarang harus mereka penuhi untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pelaksanaan

Setelah fase pengembangan strategi implementasi selesai, fase penting berikutnya dari strategi adalah implementasi strategi.

Implementasi strategi adalah proses pelaksanaan strategi dan kebijakan melalui penyusunan struktur pengembangan program, anggaran, dan prosedur pelaksanaan. Implementasi strategi merupakan fase tersulit dari proses strategis, mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi.

C. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2013), analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan, atau untuk menilai produk dan pesaingnya. Analisis SWOT juga dapat diartikan sebagai cara untuk mengembangkan strategi bagi perusahaan atau organisasi yang mewakili satu unit bisnis. SWOT adalah singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O), Threat (T) dan berarti kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan.

Analisis ini membantu untuk secara sistematis mengidentifikasi faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Analisis ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi semua kemungkinan baru dan mengidentifikasi semua kemungkinan yang ada. Hal ini membuat rencana terukur dan efektif.

Digunakan pada untuk mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis SWOT biasanya digunakan untuk mengevaluasi perusahaan atau organisasi secara internal atau eksternal. Hal ini dapat memberikan informasi tentang isu-isu kunci dan mengetahui strategi apa yang akan diterapkan di masa depan. Dalam sebuah perusahaan/organisasi, analisis dimulai dari elemen internal kemudian dengan elemen eksternal.

1.6.2 Sistem Pemerintahan Daerah

Pemerintah berimplikasi sebagai suatu sistem kendali atas kekuasaan dan wewenang dalam pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian darinya. Pemerintah adalah penguasa wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan pengelolaan bersama Asas Otonomi dan Asas Otonomi Maksimal dalam Sistem. Asas Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun itu. Pemerintah daerah adalah organisasi daerah sebagai unsur gubernur, pemerintah atau walikota, dan penyelenggara pada pemerintahan daerah, serta bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan semua pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah negara bagian dan kabupaten/kota terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dukungan kepala daerah dan pejabat daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan pemerintah pusat, yang terdiri atas departemen administrasi, legislatif, dan yudikatif, dan pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD. DPRD dan pimpinan daerah mempertahankan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan diwajibkan oleh masyarakat untuk melaksanakan misi pemerintahan yang direkomendasikan oleh pimpinan daerah. Seperti yang Anda lihat, DPRD dan pemimpin daerah memiliki mitra setara dengan fitur berbeda. DPRD memiliki kemampuan untuk mengembangkan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sedangkan pimpinan daerah bertugas melaksanakan beberapa peraturan daerah dan kebijakan. DPRD dan kepala daerah

dibantu oleh perangkat daerah dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan merupakan bagian penting dari tatanan hukum suatu pemerintahan (hukum administrasi), karena pada prinsipnya dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diterima oleh pemerintahan baru. Legitimasi tindakan nasional dapat diukur oleh otoritas yang diatur secara hukum. Kekuasaan ini berasal dari Konstitusi Negara, yang memberikan legitimasi kepada bisnis dan lembaga publik untuk menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan Pasal 13 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah daerah pada tingkat instansi/kota adalah sebagai berikut:

1. Operasi Kabupaten/Pemerintahan dalam wilayah kota.
2. Penyelenggaraan pemerintahan, penggunaannya berada dalam Wilayah Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan pemerintahan, manfaat atau akibat buruknya hanya di wilayah kabupaten/kota. Dan atau
4. Operasi pemerintahan yang menggunakan sumber dayanya lebih efisien bila dijalankan oleh bupati/jamaah.

Pemberdayaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dilakukan melalui proses yang dikenal dengan desentralisasi daerah otonom atau otonomi daerah. Ada dua bentuk desentralisasi: politik dan manajemen. Desentralisasi politik adalah kekuasaan untuk menentukan dan mengelola sumber daya yang tersedia bagi pemerintah lokal dan lokal. Desentralisasi cabang eksekutif adalah kewenangan administratif yang diberikan kepada

otoritas pusat di tingkat lokal, mulai dari pembuatan peraturan hingga pembuatan keputusan penting.

b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan kewenangan tertentu kepada desentralisasi oleh pemerintah pusat. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai otonomi negara yang dilimpahkan kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat. Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa desentralisasi tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom didasarkan pada prinsip otonomi. Selain itu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan kepentingan rakyat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi adalah bentuk pelimpahan kekuasaan atas pemerintah tingkat bawah (pusat kepada pemerintah daerah) untuk mengatur wilayahnya secara bebas tanpa campur tangan pemerintah pusat. Konsep otonomi daerah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanl, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ayat (5) “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat.”. Terdapat juga pada ayat (6) bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

c. Perangkat Daerah

Organisasi daerah ialah organisasi atau badan pemerintah daerah yang mempertanggung jawabkan atas kepala daerah dengan kaitannya pada penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan organisasi daerah dilakukan dari perspektif yang berbeda di setiap daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negara bagian, gubernur sebagai kepala negara di tingkat negara bagian adalah sekretaris daerah, sekretariat dewan rakyat daerah, kantor daerah di tingkat negara bagian, dan badan negara bagian daerah. . Organisasi Daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan diatur dalam Pasal 208 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut organisasi lokal negara bagian adalah elemen pendukung gubernur dan Partai Demokrat lokal dalam menjalankan operasi pemerintahan yang menjadi kewenangan negara. Sedangkan perangkat daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang menjalankan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan organisasi daerah bertujuan untuk membentuk kelompok organisasi yang terdiri dari lima unsur berikut. b) Sekretaris Daerah c) Kantor Wilayah d) Jabatan/Fungsi Penunjang e) Staf Pendukung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dinas-dinas daerah memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi inti yaitu membantu pimpinan daerah. Kantor wilayah mempunyai fungsi administrasi dan pengaturan sesuai dengan bidang pekerjaan pemerintahan yang dipercayakan kepada daerah.

d. Startegi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang

Berdasarkan Pasal 20-16 UU UMKM Tahun 2008 Bertindak sebagai Pembina UMKM:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memajukan usaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Produksi dan manajemen.
 - b. Pemasaran.
 - c. Sumber daya manusia dan
 - d. Desain dan teknologi.
2. Perekonomian dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam pembangunan menurut ayat (1).

Pembinaan Pasal 16 ayat (1) (a) UU No. 20 tentang UMKM berdasarkan Pasal 17 Tahun 2008 dilakukan dengan cara:

- 1) Peningkatan teknik produksi dan pengelolaan UMKM.
- 2) Memberikan kemudahan dalam produksi produk UMKM dan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan, bahan baku, dan kemasan.
- 3) Meningkatkan keterampilan desain dan teknik perusahaan menengah.

Kemampuan desain berarti kemampuan untuk membentuk kegiatan bisnis. Kemampuan teknik, di sisi lain, berarti kemampuan untuk mengubah produk, proses, atau metode untuk menghasilkan produk atau layanan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia UMKM berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan huruf c Pasal 16 (1) dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan Pemberdayaan Kewirausahaan.
2. Peningkatan keterampilan teknis dan administratif.

3. Pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas wirausaha dan menciptakan wirausahawan baru.

1.6.3 UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah)

Menurut UUD 1945, TAP MPR No. XVI/MPRRI/1998 kemudian memperkuat kebijakan ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, dan usaha mikro dan kecil harus diperkuat sebagai bagian integral dari perekonomian nasional, perekonomian. dan potensi terwujudnya struktur yang lebih seimbang, lebih berkembang dan lebih berkeadilan. Selain itu, definisi UMKM dibuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, dan definisi UMKM telah diubah seiring dengan perkembangan status Pasal 20 Pasal 1 Undang-Undang Tahun 2008 tentang UMKM menjadi semakin dinamis persawahan. sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau satu kesatuan usaha yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) UKM adalah perekonomian yang jelas dan produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengelola, atau merupakan bagian dari UKM atau perusahaan besar, yaitu perusahaan. Memenuhi standar usaha kecil di bawah undang-undang ini.
- 3) UKM adalah badan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengelola, atau merupakan

bagian dari UKM atau perusahaan besar. perusahaan. Kekayaan bersih atau penjualan tahunan diatur oleh undang-undang ini.

- 4) Perusahaan besar adalah perekonomian produktif yang dijalankan oleh suatu entitas dengan kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang lebih tinggi daripada perusahaan menengah seperti perusahaan milik negara atau swasta, perusahaan patungan, atau perusahaan asing yang memiliki ekonomi kegiatan di Indonesia. Ini adalah bisnis.
- 5) Dunia Usaha adalah usaha kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pengembangan dalam pertumbuhan UMKM yang berada di daerah Pematang.

a. Tujuan UKM

Tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 yang berbunyi " Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."

b. Klasifikasi UKM

Menurut (Rahmana, 2008) dalam (Susanto, dkk. 2016), pengembangan UKM dapat dibagi menjadi empat kelompok:

1. Kegiatan Mata Pencaharian adalah usaha kecil yang dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah dan biasa disebut dengan sektor informal.
2. Usaha Mikro adalah usaha kecil dan menengah yang sudah bersifat pengrajin tetapi belum bersifat wirausaha.

3. Small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan sudah mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast moving enterprise, merupakan UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bersiap menjadi usaha besar.

c. Permasalahan UKM

Pengembangan industri UMKM merupakan salah satu strategi dan kebijakan nasional yang berperan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Peran industri UMKM di Tanah Air merupakan penyumbang utama dan tidak ada alasan untuk meragukannya. Peluang untuk dimiliki sangat tinggi dan tersebar di berbagai daerah, sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Upaya pembangunan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menunjukkan bentuk pembangunan (Syarif, 1991), antara lain (Priatma, 2017):

- 1) Software, yaitu: a) Adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. b) Pengembangan usaha; c; Promosi penjualan; e) Kemudahan dan kenyamanan yang diberikan untuk memudahkan pengembangan usaha.
- 2) Perangkat Keras meliputi: a) Menyediakan fasilitas bersama seperti Pusat Bisnis Koperasi. b) Adanya dukungan langsung bagi pengusaha seperti permodalan.

d. Strategi Pengembangan

Anda perlu melakukan bisnis untuk mengembangkan strategi yang dijalankan untuk mengembangkan bisnis Anda. Seperti yang dijelaskan di bawah ini, ada berbagai pendapat tentang strategi

pengembangan bisnis. Menurut Sjaifudian (1995:6669) dari Priatama (2017), strategi pengembangan UKM adalah sebagai berikut:

1) Strategi pengembangan kapasitas keuangan

Status keuangan adalah salah satu hal terpenting bagi UKM, karena mereka dapat mengembangkan bisnis ini dengan keuangan yang tepat. Pembiayaan juga dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk pinjaman dan subsidi kepada bank dan lembaga lainnya.

2) Strategi pengembangan pasar

Adanya pasar bebas memberikan peluang yang besar bagi mikro dan UKM untuk mengembangkan pasarnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendukung dan mendukung pemilik usaha dengan aktif mempromosikan perusahaan.

3) Strategi pengembangan sumber daya manusia

Beberapa UKM masih kurang dalam keterampilan dan pengetahuan. Pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena berperan langsung dalam upaya tersebut. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan, pelatihan, dan seminar untuk melaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia.

4) Strategi regulasi dan perizinan

Strategi regulasi dan perizinan dapat diterapkan dengan terus memantau perkembangan UKM dan memperoleh pemahaman tentang situasi bisnis yang sebenarnya. Dalam hal perizinan, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan izin untuk memulai dan mengembangkan bisnis Anda.

Selain itu, dimungkinkan untuk mengembangkan usaha dengan memperluas skala usaha dan memperluas skala usaha (Suryana, 2013: 221).

1. Perluasan skala usaha

Perluasan skala usaha dalam pengembangan usaha dilakukan dengan memperluas skala produksi (jenis produk dan jasa), sumber daya manusia, teknologi, sistem distribusi, dan bidang usaha (penambahan badan usaha).

2. Perluasan ruang lingkup bisnis

Perluasan ruang lingkup usaha ini berkaitan dengan biaya produksi atau modal yang digunakan dalam usaha. Perluasan usaha berkaitan dengan adanya jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dengan usaha sebelumnya. Menurut survei Pariyem (2019),

Agustina (2016), peningkatan perkembangan usaha terdiri dari beberapa indikator.

- 1) Pendapatan meningkat
- 2) Peningkatan jumlah pelanggan
- 3) Peningkatan kualitas produk
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

e. Peran Penting UMKM

UMKM berperan krusial pada perekonomian Indonesia, hal tadi bisa ditinjau menurut segi jumlah bisnis & tersediannya lowongan pekerjaan yg ditimbulkan. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 "Usaha Mikro, Kecil, & Menengah bertujuan & menyebarkan usahanya pada rangka membentuk perekonomian nasional menurut demokrasi ekonomi yg berkeadilan." Maksud menurut UU tadi ingin adanya UMKM bisa ikut andil pada pembangunan ekonomi bagi warga dan berlandaskan asas demokrasi yg adil bagi setiap lapisan warga .

Menurut Bappenas donasi UMKM dalam perekonomian sangat besar, adanya UMKM bisa mengurangi taraf kemiskinan, menaikkan

baku hidup, & mendukung pencapaian distribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan. Selain itu, UMKM pula menaruh peluang kesempatan kerja & penyerapan energi kerja lantaran terbukanya lapangan pekerjaan & pula menjadi wahana bagi warga berpendapatan rendah buat menjalankan ekonomi kreatif. Keberadaan UMKM pula menyumbang devisa bagi negara karena barang yg diproduksi nir hanya dipasarkan pada negeri saja tetapi sudah menjangkau pasar luar negeri (ekspor).

1.7 Definisi Konsepsional

1. Pemerintahan Daerah

Merupakan sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pada wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Strategi

Strategi adalah rencana yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk mencapai tujuan dalam pengembangan UMKM.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adalah sebagai usaha ekonomi produktif, berdiri sendiri, usaha orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Semua pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang berada di wilayah Kabupaten Pematang Jaya.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional variable penelitian menurut Sugiyono (2015, h.38) adalah suatu atribut atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan. Dengan definisi operasional berisi tentang ciri-ciri spesifik suatu variabel seperti indikator, parameter, instrument, kriteria, ataupun definisi variabel yang dianggap penting dan bisa membantu dalam mengukur suatu variabel. Ada beberapa point penting pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisis SWOT :

a. Faktor Internal

1. Strength (kekuatan)

- a) Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber daya alam.
- b) Memanfaatkan sumber daya manusia pada Kabupaten Pemalang.

2. Weakness (kelemahan)

- a) Penerapan ilmu setelah pelatihan kurang.
- b) Modal yang dimiliki minim.

b. Faktor Eksternal

3. Opportunities (peluang)

- a) Pemasaran produk bekerjasama dengan berbagai pihak.
- b) Antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan.
- c) Sumber daya alam termanfaatkan dengan baik.

4. Threats (tantangan/ancaman)

- a) Penjualan produk tidak setiap hari laku.
- b) Pembatasan sosial selama pandemi covid-19
- c) Penurunan produksi.
- d) Munculnya pengusaha baru.

2. Strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

- a) Akses kemudahan dalam mendapatkan modal.
- b) Bantuan modal pemerintah bagi UMKM

2) Strategi Pengembangan Pasar

- a) Media saluran promosi produk.
 - b) Perlindungan pasar.
- 3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a) Pengontrolan dan pengkoordinasian pemerintah.
 - b) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UMKM.
- 4) Strategi Pengaturan dan Perijinan
 - a) Pengaturan perijinan.
 - b) Fungsi kelembagaan.
- 3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pematang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tahun 2019-2022
 - a) Sumber Daya Manusia
 - b) Sumber Daya Anggaran
 - c) Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- 4. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Pelaksanaan Strategi Pengembangan UMKM di Kabupaten Pematang
 - a) Faktor Pendukung
 - b) Faktor Penghambat

1.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan penelitian yang perlu kita ikuti mengenai aturan atau kaidah yang berlaku, dengan mendapatkan hasil penelitian yang diperoleh agar dikatakan valid. Pada dasarnya metode penelitian menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kriteria data penelitian ini, yaitu *valid*, *reliable*, dan *obyektif*.

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dinilai cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Dalam penelitian

kualitatif, proses penelitian lebih penting daripada hasil. Dengan kata lain, jika proses investigasi tepat, hasilnya akan valid secara otomatis. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman tentang fenomena atau fenomena sosial yang diteliti. Beberapa buku lain menyebutkan bahwa ada berbagai metode penelitian kualitatif seperti biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Saat mengajar. Mudjia Rahardjo memfokuskan setidaknya delapan jenis penelitian kualitatif: etnografi (etnografi), studi kasus (case studies), studi dokumen/teks (studi dokumenter), observasi alam (nature observation), katanya ada wawancara (a wawancara terfokus).), Fenomenologi (fenomenologi), grounded theory, sejarah (studi sejarah). (Lili Marlin, 2020)

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Pemalang beralamatkan Jl. Jend. Sudirman Tim. No.50, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 dan UMKM di Kabupaten Pemalang.

1.9.3 Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah segala bentuk strategi dan kebijakan Dinas Koperasi UMKM. Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan bahwa obyek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut tercantum masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Husein Umar (2013:18) Obyek penelitian adalah sebagai berikut : “Obyek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain juga di anggap perlu.”

Menurut Supriati (2015:44) pengertian objek penelitian adalah : “Variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan.” Dari pengertian diatas kita dapat mengambil kesimpulan dalam suatu kesimpulan bahwa obyek penelitian dengan gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.9.4 Sumber Data Penelitian

A. Data utama

Data yang akan dikumpulkan sang peneliti menurut liputan yg dihasilkan waktu bertemu eksklusif menggunakan informan. Data utama diperoleh menurut output observasi & wawancara terhadap subjek penelitian.

B. Data sekunder

Data sekunder dihasilkan menurut output studi pustaka, referensi, jurnal, artikel, majalah, internet & lain sebagainya. Hal ini bertujuan buat sebagai data pendukung yang berkaitan menggunakan penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Lexy J. Moleong (2011) mendefinisikan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan

mendalam serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan alat perekam. Ketika wawancara dilaksanakan peneliti juga mencatat hal-hal pokok, dilanjutkan dengan pencatatan yang lebih lengkap dan rinci setelah wawancara selesai.

b. Observasi

Beberapa informasi yang dikumpulkan dari observasi adalah ruang (tempat), pelaku, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa atau peristiwa, waktu, dan emosi. Peneliti melakukan observasi dengan menyajikan gambaran perilaku dan kejadian yang realistis, menjawab pertanyaan, memahami dan menilai perilaku manusia, yaitu mengukur aspek-aspek tertentu dan memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Menurut Narbuko dan Achmadi (2002), dalam penelitian, jenis metode observasi yang biasa digunakan untuk alat pengumpulan data adalah 1) observasi partisipan, 2) observasi sistematis, dan 3) observasi eksperimental.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai alat bantu dan alat bantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Mendokumentasikan berarti mencari data tentang sesuatu dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, map, risalah, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak sedikit sulit dalam arti sumber datanya sama jika terjadi kegagalan dan tidak berubah. Dalam metode dokumentasi, tidak ada makhluk hidup yang diamati, tetapi benda mati yang diamati. Oleh karena itu, metode dokumentasi adalah pengambilan data dalam bentuk data tertulis.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Proses analitis dalam penelitian kualitatif seringkali merupakan bagian yang paling sulit. Mengutip pendapat Miles & Huberman (1984), H. Menurut B. Sutopo (2002), “ada tiga faktor kunci yang benar-benar perlu dipahami oleh peneliti: (1) reduksi data, (2) tampilan data, dan (3) pengambilan keputusan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang tersedia. Menurut HB Sutopo (2002), “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.

2) Sajian Data

Sebagai analisis kedua, penyajian data adalah sekumpulan bentuk informasi naratif yang tersusun secara logis dan sistematis terkait dengan rumusan pertanyaan yang dirumuskan sebagai pertanyaan survei. Penyajian data merupakan penjelasan tentang kondisi rinci untuk mengkomunikasikan dan menjawab setiap pertanyaan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap penjelasan fenomena yang ada pada subjek penelitian.

3) Verifikasi / Penarikan Simpulan

Data yang dikumpulkan sejak awal survei sebenarnya merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang awalnya tidak jelas dan masih bersifat sementara, tetapi kemudian meningkat ke tahap kesimpulan yang solid. Dengan kata lain, merupakan pernyataan yang sudah memiliki dasar yang kokoh karena telah melalui proses analisis data.